p-ISSN: 2963-7856| e-ISSN: 2961-9890
Available online at jerkin.org/index.php/jerkin
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan
Volume 4 No. 3 Januari-Maret 2026, pp 15144-15158

Kebijakan Pemerintah Kota Depok Dalam Mendukung Kewirausahaan Hijau-Bank Sampah Dalam Aspek Regulasi

Arlis Prayugo[1] *, Rahadi Budi Prayitno [2], Jovan Prima Firmansyah [3], Agus Salman[4], Joko Susilo Raharjo[5]

Ilmu Politik, Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan-Abdi Negara, Jl. Lenteng Agung No. 37 A, Jagakarsa, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12610, Indonesia

E-mail: arlisyugo@yahoo.com
* Corresponding Author

https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.3853

ARTICLE INFO

Article history
Received: 24 Nov 2025
Revised: 05 Dec 2025
Accepted: 25 Dec 2025

Kata Kunci:
Kebijakan regulasi, Kewirausahaan Hijau, Komunitas Bank Sampah
.

Keywords:
Regulatory Policy, *Green Entrepreneurship*, *Community Waste Bank*

ABSTRACT

Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pemerintah Kota Depok dalam mendukung kewirausahaan hijau penguatan bank sampah komunitas melalui peran kebijakan. Metode pendekatan yang digunakan adalah pengabdian kepada masyarakat berbasis edukasi regulasi dan literasi finansial di Bank Sampah Anisa, Kelurahan Bakti Jaya. Kegiatan dilakukan dalam bentuk sosialisasi kebijakan daerah, simulasi pre dan posttest, serta diskusi partisipatif. Hasilnya menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta terkait Perda No. 5 Tahun 2014 dan Perwal No. 46 Tahun 2016, serta model pembiayaan mikro. Pemahaman peserta terhadap tantangan dan peluang pembiayaan bank sampah meningkat dari rata-rata 50% menjadi 85-100% setelah intervensi edukatif. Temuan ini memperkuat pentingnya regulasi, literasi keuangan, dan dukungan kelembagaan untuk menciptakan ekosistem kewirausahaan hijau yang inklusif dan berkelanjutan.

This activity aims to understand how the Depok City Government supports green entrepreneurship by strengthening community-based waste banks through policy roles. The approach used is community service based on regulatory education and financial literacy at the Anisa Waste Bank, located in Bakti Jaya Subdistrict. The activities were conducted in the form of local policy dissemination, pre- and post-test simulations, and participatory discussions.

The results show a significant increase in participants' understanding of Regional Regulation No. 5 of 2014 and Mayor Regulation No. 46 of 2016, as well as micro-financing models. Participants' comprehension of the challenges and opportunities in waste bank financing improved from an average of 50% to 85–100% after the educational intervention. These findings reinforce the importance of regulation, financial literacy, and institutional support in creating an inclusive and sustainable green entrepreneurship ecosystem.

This is an open access article under the CC–BY-SA license.

How to Cite: Arlis Prayugo et al (2025). Kebijakan Pemerintah Kota Depok Dalam Mendukung Kewirausahaan Hijau-Bank Sampah Dalam Aspek Regulasi
https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.3853

PENDAHULUAN

Masalah pengelolaan sampah di Kota Depok menjadi semakin kompleks seiring meningkatnya aktivitas urban dan keterbatasan TPA. Bank sampah komunitas sebagai solusi berbasis ekonomi sirkular (Pearce, D. W., & Turner, 1990) menghadapi tantangan permodalan dan literasi regulasi. Pemerintah Kota Depok telah menetapkan Perda No. 5 Tahun 2014 dan Perwal No. 46 Tahun 2016 sebagai payung hukum pengelolaan dan pembiayaan pengelolaan sampah. Namun, pelaksanaannya belum optimal. Kegiatan pengabdian masyarakat ini menjembatani kesenjangan tersebut melalui edukasi masyarakat, penguatan kelembagaan bank sampah, serta rekomendasi kebijakan pembiayaan berbasis kinerja.

Peningkatan populasi perkotaan dan perubahan pola konsumsi masyarakat telah memicu kompleksitas dalam pengelolaan sampah domestik di Indonesia, termasuk di Kota Depok. Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok, timbulan sampah rumah tangga mencapai rata-rata 1.300 ton per hari, dengan tren peningkatan pada masa perayaan dan kegiatan ekonomi musiman. Jika tidak diantisipasi, kondisi ini akan memberikan tekanan serius pada kapasitas Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), memperburuk kualitas lingkungan, dan menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat.

Untuk merespons tantangan tersebut, pendekatan community-based waste management seperti bank sampah dianggap sebagai strategi efektif dalam menerapkan prinsip ekonomi sirkular dan 3R (Reduce, Reuse, Recycle) (Heruman, 2016). Di Kota Depok, kebijakan pemerintah daerah telah menyediakan landasan hukum melalui Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2014 dan Peraturan Walikota No. 46 Tahun 2016 yang mendukung partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dan memungkinkan pendanaan dari APBD serta sumber sah lainnya. Dukungan regulatif ini diperkuat secara nasional oleh Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 14 Tahun 2021 yang mendorong pemberian insentif berbasis kinerja serta kemitraan dengan bank sampah (Permen LHK RI Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah, 2021).

Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan adanya disparitas antara kebijakan dan pelaksanaannya. Penelitian oleh Rohmawati (Dhina Rohmawati, 2015) menemukan bahwa sebagian besar bank sampah komunitas masih menghadapi stagnasi akibat rendahnya literasi finansial dan regulasi serta minimnya akses terhadap pembiayaan mikro. Hal serupa dilaporkan oleh Marlina (Ani Marlina, 2020), bahwa pengelolaan sampah rumah tangga melalui pendekatan partisipatif seringkali tersendat karena keterbatasan modal dan kapasitas kelembagaan.

Urgensi penelitian ini lahir dari kebutuhan mendesak untuk menjembatani kesenjangan antara peluang kebijakan dan implementasi lapangan, khususnya dalam pemberdayaan komunitas pengelola bank sampah. Sejumlah studi mengindikasikan bahwa intervensi pembiayaan mikro dan pelatihan berbasis literasi keuangan berpotensi meningkatkan keberlanjutan bank sampah dan mendorong munculnya wirausaha hijau di tingkat komunitas (Cokorda Krisna Yudha, Ni Luh Putu Indiani*, 2022; Mawarni Hani, 2025).

Alternatif solusi yang pernah diuji, seperti pelatihan daur ulang tanpa dukungan finansial, terbukti belum cukup efektif dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan bank sampah. Oleh karena itu, penelitian ini memfokuskan pada integrasi model pembiayaan mikro berbasis kinerja di mana pemberian insentif atau hibah disesuaikan dengan capaian seperti volume sampah yang dipilah dan jumlah nasabah aktif, sebagai pendekatan strategis yang lebih adaptif terhadap kondisi komunitas lokal (Umami, 2017).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas model pembiayaan mikro berbasis kinerja dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan bank sampah komunitas, khususnya di Kota Depok. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada perumusan kebijakan lokal yang lebih inklusif dan responsif terhadap tantangan lingkungan urban, sekaligus memperkuat peran masyarakat dalam membangun ekosistem ekonomi sirkular.

Dengan demikian, hasil dari penelitian ini tidak hanya berguna untuk pengambil kebijakan dan pelaku komunitas di Depok, tetapi juga dapat direplikasi di wilayah lain yang memiliki karakteristik tantangan serupa. Sebagaimana ditegaskan oleh Hasibuan dan Siagian (Muhammad Rivai Hasibuan & Wau, 2023), keberhasilan program bank sampah sangat ditentukan oleh kolaborasi erat antara pemerintah daerah, komunitas lokal, dan lembaga keuangan mikro. Penelitian ini juga mendukung gagasan bahwa pengelolaan sampah yang berhasil adalah pengelolaan yang berbasis gotong royong, berdaya ekonomi, dan bermuara pada pemberdayaan sosial.

METODE

Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah **penelitian terapan** (*applied research*) berbasis **Penelitian Tindakan Partisipatif** (*Participatory Action Research*). Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak hanya bertujuan untuk menemukan data atau informasi, tetapi juga untuk menghasilkan perubahan sosial nyata melalui pemberdayaan komunitas pengelola bank sampah di Kelurahan Bakti Jaya, Kota Depok. Model

Copyright © 2025, Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan
ISSN 2963-7856 (print), ISSN 2961-9890 (online)

ini mengintegrasikan proses pendidikan masyarakat, partisipasi kolektif, dan intervensi berbasis kebijakan mikro yang berorientasi pada peningkatan kapasitas kelembagaan.

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama satu bulan, yaitu dari **April hingga Mei 2025**, bertempat di **Kelurahan Bakti Jaya**, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok. Lokasi ini dipilih karena memiliki embrio bank sampah komunitas yang potensial, namun belum berkembang secara kelembagaan maupun operasional.

Target dan Sasaran Penelitian

Target utama dalam penelitian ini adalah **komunitas pengelola bank sampah** di tingkat RT/RW, serta kelompok masyarakat aktif seperti **dasa wisma, karang taruna, PKK, dan kelompok ibu pengajian**. Sasarannya adalah peningkatan kapasitas pengelolaan sampah melalui pendekatan kewirausahaan hijau berbasis pembiayaan mikro.

Subjek Penelitian

Subjek penelitian mencakup: Pengelola dan anggota bank sampah komunitas (±30 orang)**,** Perwakilan masyarakat dari kelompok sosial (±20 orang)**,** Aparatur Kelurahan Bakti Jaya**,** Perwakilan Dinas Lingkungan Hidup Kota Depok**,** Lembaga keuangan mikro lokal (BMT atau koperasi).

Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Identifikasi dan Observasi Awal
   Mengidentifikasi kondisi eksisting pengelolaan sampah dan kendala kelembagaan melalui observasi dan diskusi dengan tokoh masyarakat dan pengelola bank sampah.
2. Sosialisasi dan Edukasi
   Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang peraturan daerah, peluang pembiayaan, serta manfaat ekonomi sirkular melalui pelatihan interaktif.
3. Intervensi Program
   Melaksanakan pelatihan literasi keuangan, simulasi pengajuan pembiayaan mikro, dan praktik manajemen bank sampah berbasis indikator kinerja.
4. Evaluasi dan Refleksi
   Melakukan pretest dan posttest, serta FGD untuk mengukur efektivitas pelatihan dan perubahan pengetahuan serta sikap peserta.
5. Rekomendasi Kebijakan
   Menyusun laporan dan model pembiayaan berbasis kinerja yang dapat diadvokasikan kepada pemerintah daerah sebagai kebijakan replikasi.

Data dan Instrumen

Penelitian ini menggunakan dua jenis data:

1. **Data primer**: diperoleh dari observasi, wawancara, FGD, kuesioner pretest–posttest, dan dokumentasi kegiatan lapangan.
2. **Data sekunder:** berasal dari dokumen resmi seperti Perda No. 5 Tahun 2014, Perwal No. 46 Tahun 2016, serta data Dinas LH Kota Depok.

Instrumen pengumpulan data meliputi: Kuesioner pretest dan posttest (10 indikator pengetahuan), panduan wawancara semi-terstruktur, lembar observasi aktivitas pelatihan, catatan lapangan dan dokumentasi visual

Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan meliputi:

1. ***Observasi partisipatif***, untuk mengamati keterlibatan masyarakat dalam kegiatan bank sampah
2. ***Wawancara mendalam***, terhadap pengelola bank sampah dan pemangku kepentingan
3. ***Focus Group Discussion (FGD)***, untuk menangkap persepsi kolektif dan validasi hasil temuan
4. ***Tes pengetahuan (pretest–posttest)***, untuk mengukur perubahan pemahaman peserta

Keabsahan Data Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dan kuantitatif:

1. Data kuantitatif dari pretest dan posttest dianalisis menggunakan rumus persentase peningkatan untuk 10 indikator (lihat Tabel Evaluasi, halaman 16 laporan).

2. Data kualitatif dari wawancara dan FGD dianalisis melalui teknik **reduksi data, kategorisasi, dan interpretasi tematik** untuk memahami dinamika sosial dan potensi implementasi model pembiayaan.

Untuk menjaga validitas dan reliabilitas data:

1. Triangulasi metode diterapkan (wawancara, observasi, dokumentasi)
2. Validasi hasil melalui diskusi reflektif bersama tokoh masyarakat dan peserta kegiatan
3. Analisis dilakukan oleh tim peneliti lintas bidang (lingkungan, keuangan mikro, dan pemberdayaan masyarakat)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tingkat Pengetahuan Peserta Terhadap Produksi Sampah Kota Depok

Dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai permasalahan lingkungan, khususnya produksi sampah di wilayah perkotaan, sebuah kegiatan pengabdian kepada masyarakat diselenggarakan dengan mengusung tema "Volume Sampah yang Dihasilkan Kota". Kegiatan ini diawali dengan pemberian pretest kepada 20 peserta untuk mengukur pengetahuan awal mereka mengenai jumlah sampah yang dihasilkan oleh Kota Depok.

Hasil pretest menunjukkan bahwa sebagian besar peserta masih memiliki tingkat pengetahuan yang rendah terhadap isu tersebut. Hanya 5 peserta atau sebesar 25% yang menyatakan mengetahui informasi tentang volume sampah kota, sedangkan 75% lainnya atau 15 peserta mengaku tidak mengetahui sama sekali. Hal ini menandakan bahwa sebelum dilakukan intervensi edukatif, pemahaman masyarakat mengenai persoalan konkret lingkungan di kota mereka masih sangat minim.

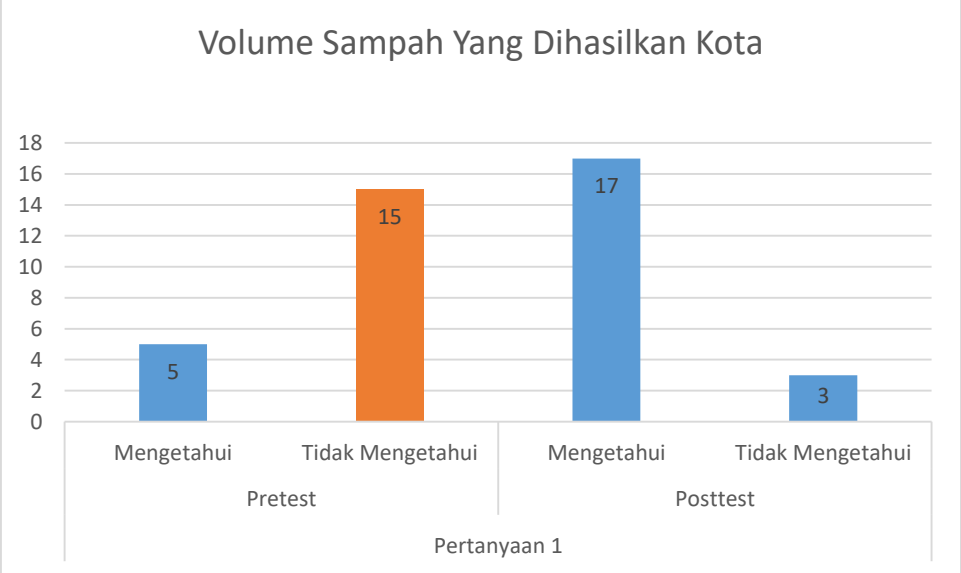

Setelah proses edukasi melalui penyuluhan, diskusi, dan pemberian materi interaktif mengenai pentingnya pengelolaan sampah serta data faktual terkait jumlah produksi sampah di Kota Depok, dilakukan posttest dengan pertanyaan yang sama untuk mengevaluasi efektivitas kegiatan. Hasil posttest menunjukkan peningkatan pengetahuan yang signifikan. Sebanyak 17 dari 20 peserta, atau setara dengan 85%, menyatakan bahwa mereka kini mengetahui jumlah sampah yang dihasilkan kota mereka. Sementara itu, hanya 3 peserta atau 15% yang masih belum memahami informasi tersebut. Perubahan ini mencerminkan adanya peningkatan sebesar 60% dalam tingkat pengetahuan peserta setelah mengikuti kegiatan.

Temuan ini menegaskan bahwa kegiatan pengabdian masyarakat yang dirancang dengan pendekatan edukatif dan partisipatif mampu memberikan dampak positif dalam meningkatkan kesadaran warga terhadap isu lingkungan. Pengetahuan yang lebih baik tentang produksi sampah tidak hanya penting untuk meningkatkan kesadaran, tetapi juga menjadi landasan awal dalam mendorong perubahan perilaku ke arah yang lebih ramah lingkungan. Oleh karena itu, kegiatan seperti ini perlu terus dilaksanakan secara berkelanjutan dengan sasaran masyarakat yang lebih luas untuk memperkuat peran aktif warga dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan di Kota Depok dan sekitarnya.

Copyright © 2025, Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan
ISSN 2963-7856 (print), ISSN 2961-9890 (online)

Tingkat Pemahaman tujuan PKM STIP-AN Jakarta

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh STIP-AN Jakarta bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peserta tentang peran dan tujuan pengabdian masyarakat, khususnya dalam mendukung program Bank Sampah sebagai solusi berkelanjutan untuk pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Untuk mengukur keberhasilan kegiatan edukatif ini, dilakukan pengujian awal (pretest) dan pengujian akhir (posttest) kepada 20 peserta.

Hasil pretest menunjukkan bahwa dari total 20 peserta, 12 orang (60%) telah mengetahui tujuan dari kegiatan pengabdian masyarakat yang terkait dengan Bank Sampah. Sementara itu, masih terdapat 8 peserta (40%) yang belum memiliki pemahaman tentang hal tersebut. Hal ini menandakan bahwa sebelum pelaksanaan kegiatan, sebagian peserta belum memiliki kesadaran yang memadai tentang pentingnya peran Bank Sampah dalam mendukung kebijakan pengelolaan sampah dan pemberdayaan masyarakat.

Setelah sesi edukasi yang menyajikan materi mengenai konsep, manfaat, dan tujuan program Bank Sampah sebagai bagian dari pengabdian masyarakat, dilakukan posttest untuk mengukur sejauh mana peningkatan pengetahuan peserta. Hasilnya sangat menggembirakan: seluruh peserta (100%), yaitu 20 orang, menyatakan telah mengetahui tujuan dari kegiatan pengabdian masyarakat terhadap Bank Sampah. Tidak ada satu pun peserta yang memilih jawaban “tidak mengetahui,” yang berarti terjadi peningkatan pemahaman sebesar 40% dibandingkan kondisi sebelum pelatihan.

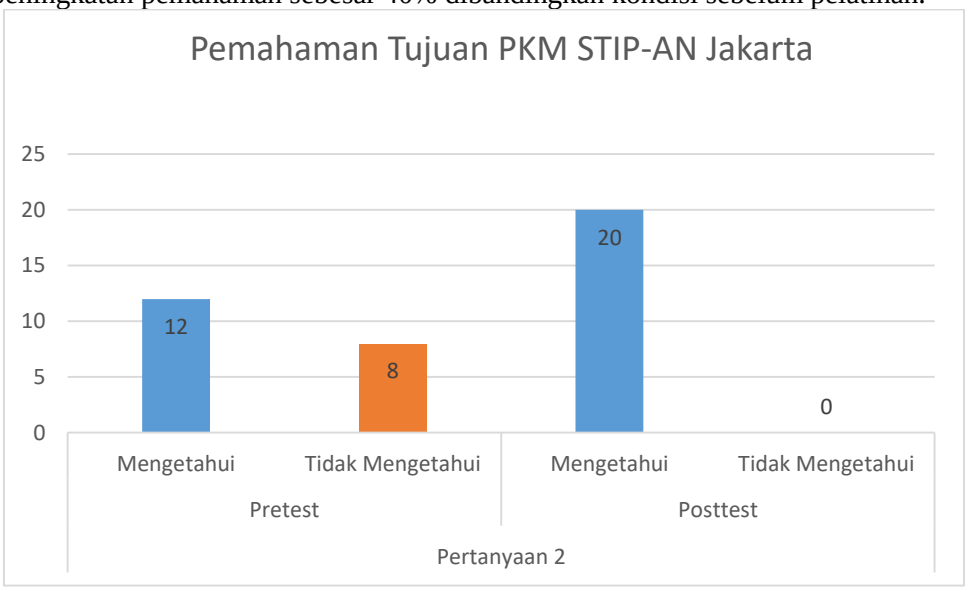

Peningkatan yang signifikan dari pretest ke posttest menunjukkan bahwa kegiatan pengabdian masyarakat ini berjalan dengan sangat efektif. Dengan peningkatan pemahaman

dari **60% menjadi 100%,** terbukti bahwa metode penyuluhan, diskusi interaktif, dan materi yang disampaikan telah berhasil membuka wawasan peserta tentang pentingnya tujuan dari pengabdian masyarakat STIP-AN Jakarta terhadap keberlangsungan program Bank Sampah. Pemahaman ini menjadi fondasi yang penting agar peserta tidak hanya mengetahui, tetapi juga dapat berperan aktif dalam mengimplementasikan sistem Bank Sampah di lingkungan masing-masing. Ke depan, pelatihan semacam ini perlu diperluas jangkauannya agar semakin banyak masyarakat yang memahami dan mendukung inisiatif pengelolaan sampah yang ramah lingkungan dan berbasis komunitas.

Tingkat Pengetahuan Peserta Terhadap Lokasi Kegiatan

Sebagai bagian dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh STIP-AN Jakarta, dilakukan asesmen terhadap tingkat pengetahuan peserta mengenai lokasi kegiatan mitra Bank Sampah. Tujuan dari asesmen ini adalah untuk memastikan bahwa peserta tidak hanya memahami konsep dan tujuan pengabdian masyarakat, tetapi juga memiliki informasi praktis yang akurat mengenai lokasi pelaksanaan kegiatan, sehingga memungkinkan mereka terlibat secara langsung dan aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan.

Pada tahap pretest, seluruh 20 peserta (100%) telah menunjukkan bahwa mereka mengetahui lokasi kegiatan Bank Sampah yang menjadi mitra dalam kegiatan pengabdian ini. Tidak ada peserta yang menjawab “tidak mengetahui”. Hasil ini menunjukkan bahwa informasi mengenai lokasi kegiatan telah tersampaikan secara baik bahkan sebelum materi edukatif utama diberikan. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh komunikasi awal yang dilakukan oleh panitia kegiatan atau penyampaian informasi logistik sebelumnya.

Copyright © 2025, Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan
ISSN 2963-7856 (print), ISSN 2961-9890 (online)

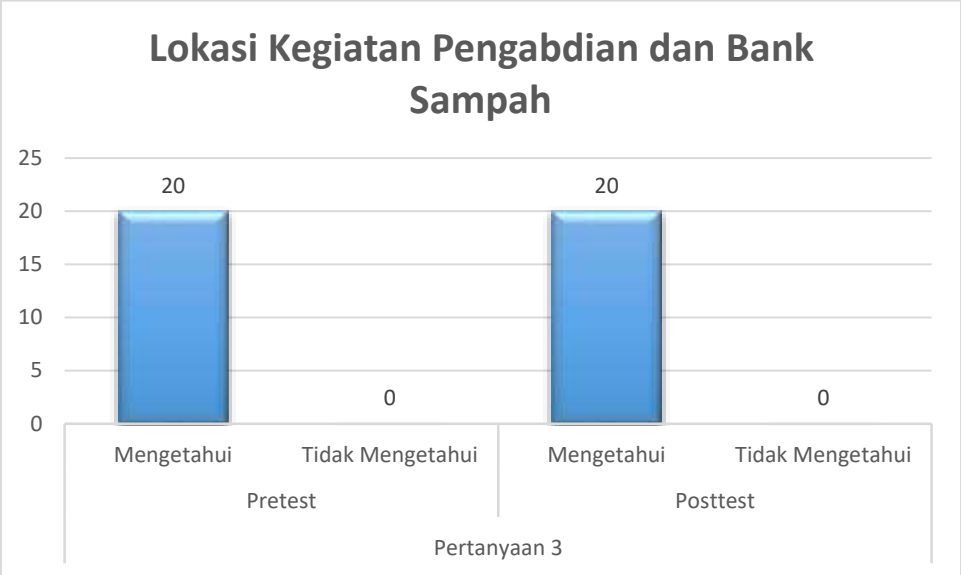

Selanjutnya, dilakukan posttest untuk memastikan bahwa peserta benar-benar memahami lokasi kegiatan dan tidak hanya mengetahui secara sementara. Hasil posttest menunjukkan konsistensi yang sangat baik, di mana 100% peserta (20 orang) kembali menyatakan bahwa mereka mengetahui lokasi Bank Sampah, dan tidak ada satupun peserta yang tidak mengetahui. Dengan demikian, tidak terjadi perubahan persentase dari pretest ke posttest, tetapi tetap menunjukkan tingkat pemahaman yang maksimal dan stabil.

Hasil ini mencerminkan bahwa penyampaian informasi logistik mengenai lokasi mitra Bank Sampah telah dilakukan dengan sangat baik dan diterima dengan baik pula oleh seluruh peserta. Pengetahuan ini penting karena lokasi menjadi elemen krusial dalam pelaksanaan program pengabdian, termasuk untuk kunjungan langsung, praktik lapangan, dan partisipasi lanjutan. Stabilitas tingkat pengetahuan peserta antara pretest dan posttest menegaskan efektivitas komunikasi dalam kegiatan ini dan kesiapan peserta untuk terlibat aktif di lokasi mitra yang telah ditentukan oleh pengelola dan pengurus yang terlibat dalam kegiatan PKM STIP-AN Jakarta.

Tingkat Pemahaman Peserta terhadap Masalah Utama Bank Sampah

Sebagai bagian dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berfokus pada edukasi lingkungan dan pengelolaan sampah, STIP-AN Jakarta menyelenggarakan sesi untuk meningkatkan pemahaman peserta mengenai persoalan utama yang dihadapi oleh Bank Sampah. Sesi ini diawali dengan pretest untuk mengetahui tingkat pemahaman awal peserta, dan dilanjutkan dengan posttest setelah dilakukan penyuluhan.

Hasil pretest menunjukkan bahwa dari 20 peserta, hanya 8 orang (40%) yang memahami atau mengetahui persoalan utama yang sering dihadapi oleh Bank Sampah, seperti rendahnya partisipasi masyarakat, lemahnya manajemen, dan kesulitan dalam pemasaran sampah daur ulang. Sebaliknya, masih terdapat 12 peserta (60%) yang belum mengetahui atau memahami isu-isu penting tersebut. Hasil ini mencerminkan masih terbatasnya kesadaran masyarakat terhadap tantangan operasional yang dihadapi oleh Bank Sampah sebagai institusi pengelola limbah berbasis komunitas.

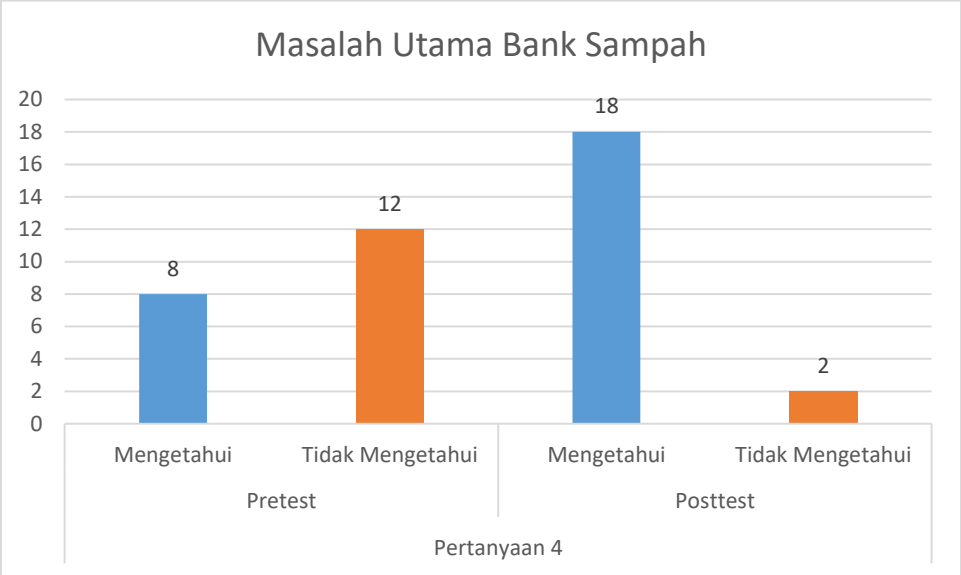

Setelah dilakukan edukasi yang menyajikan fakta, studi kasus, dan diskusi kelompok terkait permasalahan yang dialami Bank Sampah di lapangan, dilakukan posttest. Hasilnya menunjukkan peningkatan signifikan: sebanyak 18 peserta (90%) telah memahami persoalan utama Bank Sampah, sementara hanya 2 peserta (10%) yang masih belum mengetahui atau belum memahami secara utuh. Yakni mereka memahami bahwa salah satu persoalan utama yang dihadapi bank sampah adalah terkait regulasi yang mengaturnya.

Dari hasil di atas, dapat disimpulkan bahwa kegiatan edukatif dalam rangka pengabdian kepada masyarakat ini berhasil meningkatkan pengetahuan peserta terhadap persoalan utama yang dihadapi Bank Sampah sebesar 50%, yaitu dari 40% menjadi 90%. Kenaikan ini menunjukkan bahwa penyuluhan yang dilaksanakan efektif dalam membekali peserta dengan wawasan kritis mengenai permasalahan riil yang menghambat kinerja Bank Sampah, sekaligus memperkuat kesiapan mereka dalam mendukung dan berkontribusi pada upaya pengelolaan sampah berbasis komunitas. Pemahaman yang baik tentang permasalahan ini menjadi landasan penting bagi terciptanya solusi yang lebih partisipatif dan berkelanjutan ke depan.

Tingkat Pemahaman terhadap bentuk insentif yang tidak diberikan dari pemerintah

Dalam upaya meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap kebijakan pemerintah daerah dalam mendukung pengelolaan sampah, STIP-AN Jakarta melaksanakan sesi edukatif yang membahas bentuk-bentuk insentif yang seharusnya atau idealnya diberikan kepada Bank

Copyright © 2025, Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan
ISSN 2963-7856 (print), ISSN 2961-9890 (online)

Sampah, serta insentif yang sejatinya belum tersedia atau tidak diberikan oleh pemerintah. Tujuannya adalah membekali peserta dengan informasi yang lebih kritis dan faktual, agar mereka mampu membedakan bentuk dukungan nyata dan wacana ideal terhadap Bank Sampah di lingkungan mereka.

Sebelum sesi dimulai, peserta diberikan pretest dengan sejumlah opsi jawaban yang mencakup bentuk insentif seperti: penghargaan, publikasi kinerja, rekomendasi bantuan pembiayaan, pinjaman tanpa bunga langsung dari presiden. Dari total 20 peserta, hanya 8 orang (40%) yang berhasil mengidentifikasi bentuk insentif yang tidak diberikan oleh pemerintah, sementara 12 peserta (60%) memilih opsi-opsi yang sebenarnya merupakan insentif yang *sudah* tersedia atau diberikan oleh pemerintah daerah. Hasil ini menunjukkan adanya ketidakjelasan informasi di kalangan peserta terkait dukungan riil pemerintah terhadap Bank Sampah.

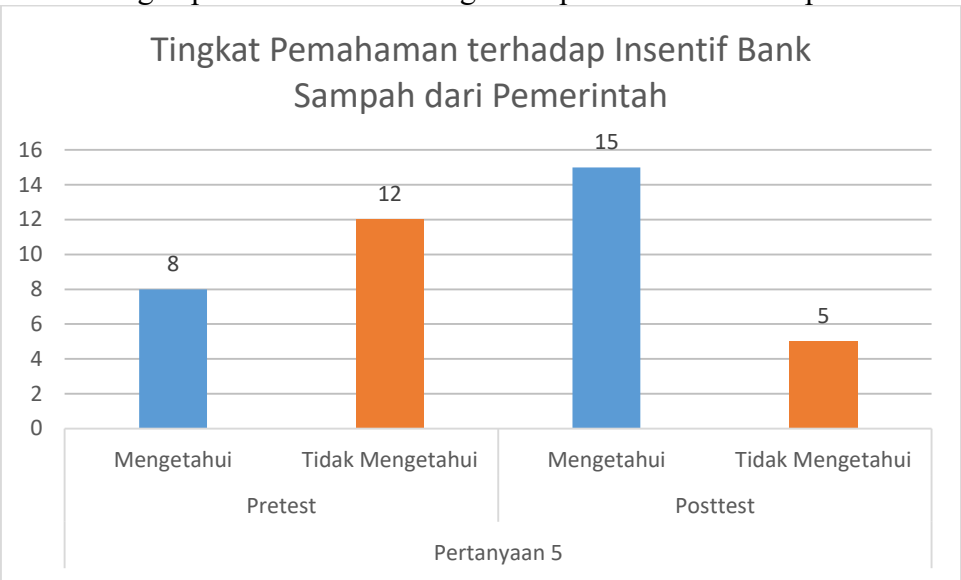

Setelah penyuluhan dilakukan dengan pemaparan data kebijakan daerah, studi kasus kelembagaan Bank Sampah, dan sesi diskusi interaktif mengenai bentuk dukungan yang benar-benar dialami di lapangan posttest kembali diberikan dengan pertanyaan dan opsi yang serupa. Hasilnya menunjukkan peningkatan signifikan, di mana 15 peserta (75%) mampu mengidentifikasi dengan tepat insentif yang tidak diberikan, dan hanya 5 peserta (25%) yang masih salah persepsi atau memilih jawaban yang keliru.

Kegiatan ini terbukti efektif dalam meningkatkan kemampuan peserta untuk membedakan bentuk insentif yang benar-benar tidak tersedia dari yang sebenarnya telah diberikan oleh pemerintah daerah. Peningkatan dari 40% menjadi 75% dalam akurasi pemahaman mencerminkan keberhasilan penyuluhan dalam membongkar miskonsepsi umum yang sering terjadi di kalangan masyarakat. Pengetahuan ini sangat krusial, terutama agar warga dapat memberikan masukan kebijakan yang tepat dan tidak menuntut sesuatu yang sudah ada atau sebaliknya, mengadvokasi bentuk insentif yang belum tersedia tapi dibutuhkan.

Kedepannya, model pembelajaran berbasis pilihan ganda kritis seperti ini bisa terus dikembangkan agar masyarakat lebih memahami fakta kebijakan lingkungan dan mampu bersikap lebih konstruktif dalam mendukung keberlanjutan Bank Sampah.

Tingkat Pengetahuan Peserta Atas Sumber Pembiayaan Bank Sampah Menurut PERDA

Dalam rangka menilai efektivitas penyuluhan mengenai kebijakan lokal tentang pengelolaan dan pembiayaan bank sampah, dilakukan pengukuran terhadap pemahaman peserta melalui metode pretest dan posttest pada pertanyaan yang berkaitan dengan sumber pembiayaan bank sampah berdasarkan Perda Kota Depok No. 5 Tahun 2014. Perda tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa pembiayaan operasional dan pengembangan bank sampah dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta dari sumber-sumber lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil dari pretest menunjukkan bahwa tingkat pemahaman peserta masih tergolong sedang, di mana hanya 60% peserta (12 dari 20 orang) yang mengetahui bahwa pembiayaan bank sampah dapat bersumber dari APBD dan sumber sah lainnya. Sementara 40% sisanya (8 orang) belum memiliki pemahaman tersebut. Temuan ini mencerminkan adanya kesenjangan pengetahuan masyarakat terkait kerangka hukum dan dukungan kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah, khususnya dalam hal pembiayaan kelembagaan seperti bank sampah.

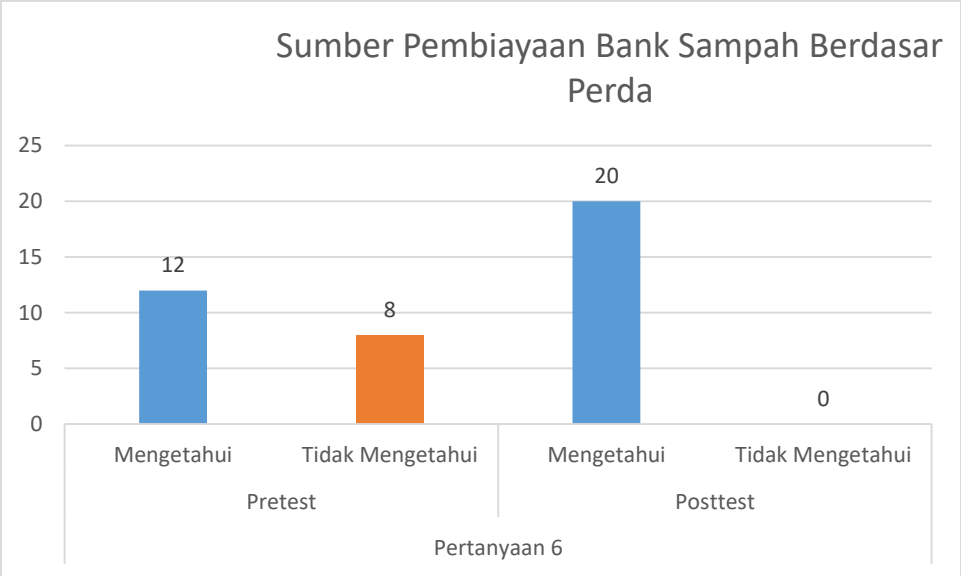

Namun, setelah dilakukan intervensi edukatif berupa penyuluhan atau pelatihan yang mendalam mengenai isi dan implikasi Perda No. 5 Tahun 2014, terjadi perubahan drastis dalam pemahaman peserta. Hal ini tercermin dalam hasil posttest di mana seluruh peserta (100%) menyatakan telah mengetahui sumber pembiayaan bank sampah sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah tersebut. Tidak satupun peserta yang menjawab "tidak mengetahui" pada fase ini, menunjukkan efektivitas materi dan metode penyampaian yang digunakan dalam proses pembelajaran.

Peningkatan pemahaman ini sangat penting karena pemahaman masyarakat atau pelaku bank sampah mengenai legalitas dan sumber pembiayaan merupakan elemen krusial dalam keberlanjutan operasional bank sampah. Dengan mengetahui bahwa mereka memiliki legitimasi hukum untuk memperoleh dana dari APBD serta sumber lain yang sah, pengurus bank sampah akan lebih percaya diri dalam mengakses sumber daya, mengajukan proposal pendanaan, dan menjalin kerja sama lintas sektor.

Secara kuantitatif, lonjakan dari 60% ke 100% pemahaman mencerminkan peningkatan pemahaman sebesar 40 poin persentase, yang tergolong sangat tinggi dalam konteks pelatihan berbasis komunitas. Hal ini menjadi indikator bahwa kegiatan edukatif serupa dapat terus dikembangkan dan diperluas cakupannya untuk memperkuat implementasi kebijakan pengelolaan sampah berbasis partisipasi masyarakat.

Dengan demikian, hasil ini tidak hanya menunjukkan keberhasilan teknis dari satu sesi pelatihan, tetapi juga menggambarkan pentingnya literasi regulasi dalam mendukung program-program berbasis masyarakat seperti bank sampah. Langkah ini dapat dijadikan sebagai model pendekatan edukatif untuk peningkatan kapasitas kelembagaan lainnya yang bergantung pada dukungan kebijakan daerah.

Tingkat Pengetahuan Peserta atas Tantangan Pengembangan Skema Pembiayaan Bank Sampah

Pada tahap pretest, sebanyak 13 dari 20 peserta (atau 65%) telah memiliki pemahaman terhadap tantangan-tantangan utama dalam pengembangan skema pembiayaan bank sampah. Artinya, mayoritas peserta sudah memiliki kesadaran awal terkait hambatan-hambatan struktural maupun teknis yang sering muncul dalam pendanaan bank sampah, seperti keterbatasan alokasi anggaran, kurangnya regulasi teknis yang rinci, dan minimnya akses ke lembaga keuangan formal.

Sementara itu, 7 peserta (35%) belum mengetahui tantangan ini secara mendalam. Ini menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar peserta telah terpapar isu-isu pengelolaan sampah, masih terdapat kebutuhan akan peningkatan kapasitas pemahaman khusus dalam aspek kebijakan dan pembiayaan berkelanjutan.

Copyright © 2025, Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan
ISSN 2963-7856 (print), ISSN 2961-9890 (online)

Setelah diberikan intervensi edukatif melalui pelatihan atau penyuluhan, hasil posttest menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta. Sebanyak 17 peserta (85%) menyatakan telah mengetahui tantangan pengembangan skema pembiayaan bank sampah, mengalami peningkatan sebesar 20 poin persentase dari kondisi pretest. Sementara hanya 3 peserta (15%) yang masih belum mengetahui atau belum sepenuhnya memahami isu ini.

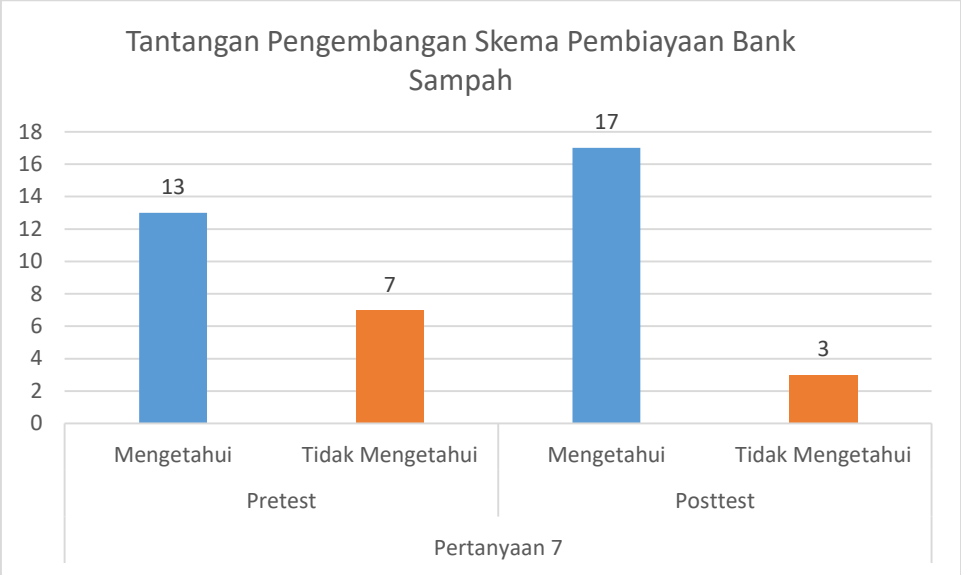

Peningkatan dari 65% menjadi 85% peserta yang memahami tantangan pembiayaan menandakan keberhasilan program edukasi dalam membekali peserta dengan pemahaman yang lebih sistematis dan strategis terhadap isu-isu nyata di lapangan. Hal ini penting mengingat pembiayaan adalah salah satu elemen krusial dalam keberlanjutan operasional bank sampah. Tanpa pemahaman menyeluruh terhadap tantangan seperti keterbatasan dukungan fiskal, mekanisme insentif, dan keterlibatan sektor swasta, sulit bagi komunitas untuk mengembangkan bank sampah secara mandiri dan berkelanjutan.

Selain itu, masih adanya 15% peserta yang belum memahami sepenuhnya isu ini menjadi pengingat bahwa proses edukasi harus dilakukan secara berkelanjutan dan beragam, baik melalui pelatihan tatap muka, pendampingan teknis, maupun media informasi publik. Pemahaman yang merata di seluruh lapisan masyarakat sangat penting agar skema pembiayaan yang dikembangkan dapat bersifat partisipatif dan adaptif terhadap kondisi lokal.

Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa kegiatan edukatif yang diberikan telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan pemahaman peserta. Persentase kenaikan pemahaman sebesar 20% merupakan pencapaian yang patut diapresiasi dan menjadi dasar untuk melanjutkan pendekatan edukatif ini dalam kegiatan serupa di masa mendatang.

Mendorong pemahaman terhadap tantangan pembiayaan bukan hanya penting untuk aspek teknis operasional, tetapi juga untuk mendorong advokasi kebijakan dan pendampingan untuk mengakses kepada pelatihan dan bantuan pembiayaan, penguatan kelembagaan, dan peningkatan kolaborasi multipihak dalam pengelolaan sampah berbasis komunitas.

Tingkat Pengetahuan Peserta terhadap rekomendasi strategis

Pada saat pretest, jumlah peserta yang menjawab dengan benar (kategori “Mengetahui”) sebanyak 10 orang, atau 50% dari total peserta (diasumsikan 20 orang), dan sisanya 10 orang (50%) menyatakan tidak mengetahui jawaban yang benar. Hal ini menunjukkan bahwa sebelum pelatihan, hanya separuh peserta yang memahami strategi pengusulan yang benar dalam konteks pengelolaan dan pengembangan bank sampah.

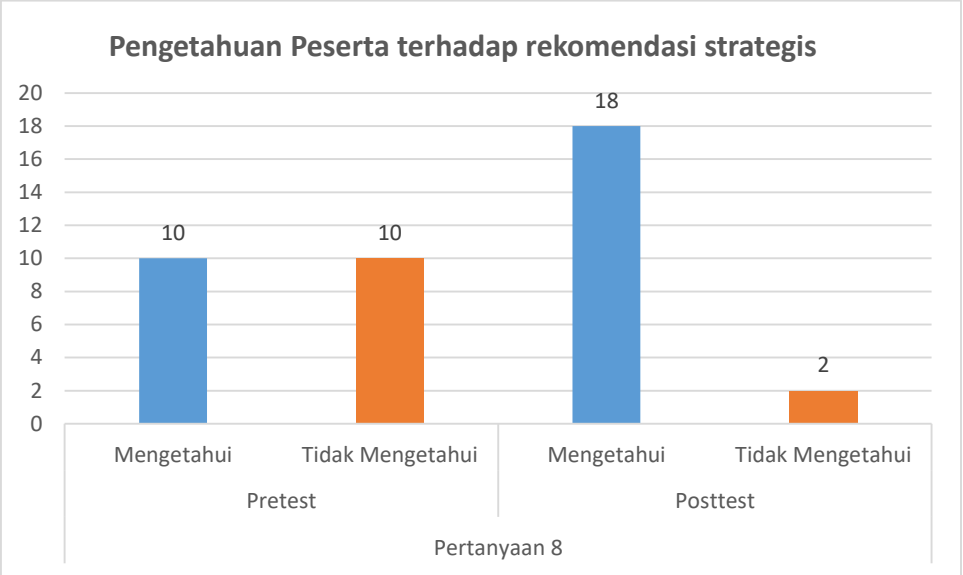

Namun, setelah intervensi edukatif dilaksanakan, terjadi peningkatan drastis dalam pemahaman peserta. Pada saat posttest, sebanyak 18 orang (90%) menunjukkan pemahaman yang benar atas strategi yang diusulkan, yakni pengembangan skema kredit mikro berbasis kinerja. Hanya 2 orang (10%) yang masih belum mengetahui atau menjawab dengan tidak tepat.

Peningkatan dari 50% ke 90% dalam kategori mengetahui menandakan efektivitas pelatihan atau kegiatan edukasi yang diberikan. Hal ini juga mencerminkan bahwa materi yang disampaikan telah menjawab kebutuhan pengetahuan peserta dalam memahami strategi-strategi yang relevan dan realistis dalam pengembangan bank sampah, khususnya yang berbasis komunitas di Kota Depok.

Dengan demikian, data ini memperkuat pentingnya pelatihan atau pengabdian kepada masyarakat dalam meningkatkan literasi strategis para peserta, terutama dalam aspek kebijakan dan rekomendasi pembiayaan. Keberhasilan ini dapat menjadi indikator keberlanjutan program edukasi dan advokasi untuk penguatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan sampah secara sistemik.

Tingkat Pengetahuan Peserta Terhadap Peluang Bank Sampah

Pada saat pretest, sebanyak 12 peserta dari total 20 orang (atau 60%) menjawab dengan benar dan menunjukkan pemahaman terhadap peluang kolaboratif yang tersedia untuk bank sampah komunitas. Sementara itu, 8 peserta (40%) belum mengetahui atau menjawab tidak tepat mengenai peluang tersebut. Persentase ini menunjukkan bahwa sebagian besar peserta sudah memiliki pemahaman dasar mengenai peluang eksternal yang relevan bagi pengembangan bank sampah, namun masih ada sekelompok signifikan yang belum memahami pentingnya aspek kolaboratif dengan institusi keuangan.

Setelah diberikan intervensi berupa pelatihan atau kegiatan sosialisasi, hasil posttest menunjukkan peningkatan yang sangat positif. Sebanyak 17 peserta (85%) kini menunjukkan pemahaman yang benar terhadap peluang strategis tersebut, sedangkan hanya 3 peserta (15%) yang masih belum memahami. Terjadi peningkatan sebesar 25% dalam tingkat pemahaman peserta terhadap substansi pertanyaan setelah edukasi diberikan.

Copyright © 2025, Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan
ISSN 2963-7856 (print), ISSN 2961-9890 (online)

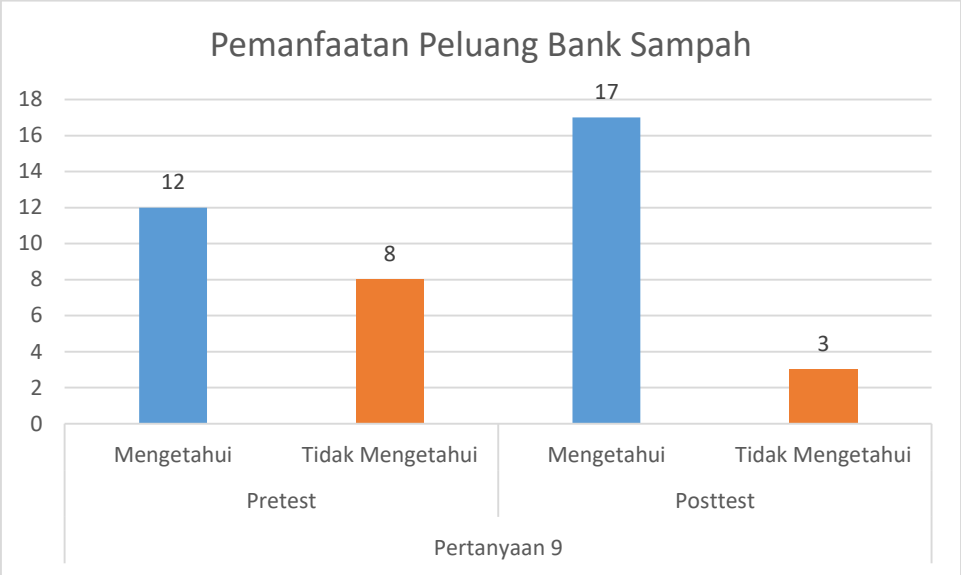

Kenaikan dari 60% menjadi 85% dalam kategori "Mengetahui" menandakan bahwa pelatihan yang dilakukan sangat efektif dalam meningkatkan kesadaran dan pengetahuan peserta mengenai potensi kerja sama yang dapat dimanfaatkan oleh bank sampah komunitas, khususnya dalam bentuk kolaborasi dengan lembaga keuangan mikro. Pengetahuan ini sangat krusial karena memperkuat kemampuan peserta dalam merancang model bisnis yang berkelanjutan untuk bank sampah, tidak hanya mengandalkan dukungan pemerintah tetapi juga menjajaki peluang pendanaan alternatif yang berbasis kemitraan.

Temuan ini sekaligus mengindikasikan bahwa penyampaian materi yang terstruktur dan kontekstual mampu menjembatani kesenjangan pemahaman awal peserta terhadap konsep-konsep strategis. Dengan demikian, program edukasi atau pengabdian yang dilaksanakan tidak hanya meningkatkan pengetahuan, tetapi juga membuka cakrawala pemikiran peserta untuk melihat peluang sinergi dalam pengelolaan sampah secara profesional dan berorientasi pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Tingkat Pengetahuan Peserta terhadap Peraturan Walikota tentang Pembiayaan

Berdasarkan grafik yang ditampilkan untuk **Pertanyaan nomor 10**, yang membahas tentang **isi Pasal 30 Peraturan Wali Kota (Perwal) Depok No. 46 Tahun 2016** mengenai *pembiayaan yang bersumber dari APBD dan sumber sah lainnya*, terdapat peningkatan yang sangat mencolok dalam tingkat pemahaman peserta setelah pelaksanaan pelatihan atau kegiatan edukatif. Jawaban yang benar atas pertanyaan ini adalah: ***"APBD dan sumber sah lainnya dapat digunakan untuk pembiayaan sarana dan pelatihan",*** sesuai dengan isi dokumen soal.

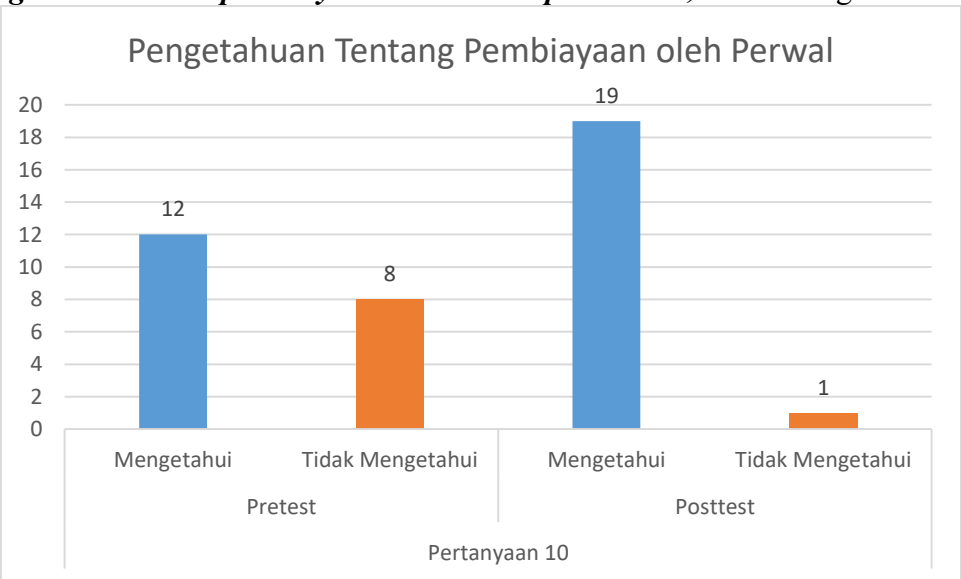

Pada saat pretest, 12 peserta (60%) dari total 20 orang telah mengetahui isi dari pasal tersebut, menunjukkan adanya pemahaman awal yang cukup baik mengenai aspek regulasi pembiayaan oleh pemerintah daerah. Namun, masih terdapat 8 peserta (40%) yang belum mengetahui atau memiliki persepsi yang keliru terhadap ketentuan dalam Perwal ini.

Setelah diberikan intervensi berupa edukasi, hasil posttest menunjukkan lonjakan signifikan dalam pemahaman peserta. Sebanyak 19 peserta (95%) menjawab dengan benar bahwa Pasal 30 Perwal No. 46 Tahun 2016 menyatakan pembiayaan pengelolaan sampah dapat menggunakan APBD dan sumber sah lainnya untuk sarana dan pelatihan. Hanya 1 peserta (5%) yang masih belum memahami atau menjawab tidak tepat.

Kenaikan dari 60% menjadi 95% pada kategori "Mengetahui" mencerminkan keberhasilan program edukatif dalam meningkatkan pemahaman peserta terhadap aspek hukum dan kebijakan pembiayaan publik dalam konteks pengelolaan sampah. Fakta bahwa hampir seluruh peserta mampu menjawab dengan benar pada posttest menunjukkan bahwa informasi mengenai regulasi formal telah tersampaikan dengan efektif dan dipahami dengan baik.

Hal ini penting karena pemahaman terhadap dasar hukum seperti Pasal 30 Perwal No. 46 Tahun 2016 menjadi landasan bagi para pelaku di lapangan, seperti pengelola bank sampah komunitas dan perangkat kelurahan, untuk merancang program yang sesuai dengan ketentuan dan memanfaatkan peluang pembiayaan dari pemerintah daerah. Keberhasilan edukasi ini dapat memperkuat kapasitas institusional dalam menyusun rencana pengembangan sarana dan pelatihan secara legal dan berkelanjutan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil evaluasi pretest dan posttest terhadap sepuluh indikator pertanyaan utama, dapat disimpulkan bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh STIP-AN Jakarta telah berhasil secara signifikan meningkatkan tingkat pengetahuan dan pemahaman peserta terhadap berbagai aspek pengelolaan bank sampah berbasis komunitas di Kota Depok. Dari mulai pemahaman mengenai volume produksi sampah, tujuan kegiatan PKM, lokasi mitra, peraturan pembiayaan, hingga strategi dan peluang pengembangan kelembagaan bank sampah, semua aspek menunjukkan tren peningkatan pemahaman peserta dengan kisaran kenaikan antara 20% hingga 60%. Pencapaian tertinggi terjadi pada indikator pemahaman terhadap Perda dan Perwal yang berkaitan dengan sumber pembiayaan, di mana hampir seluruh peserta mampu memahami substansi regulasi dengan akurat setelah intervensi edukatif. Temuan ini menunjukkan bahwa metode penyuluhan interaktif yang menggabungkan ceramah, diskusi kelompok, studi kasus, dan soal evaluasi terbukti efektif untuk mendorong peningkatan literasi kebijakan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan penuh rasa syukur, tim Pengabdian Kepada Masyarakat menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan *"Peran Pemerintah Daerah Kota Depok dalam Mendukung Modal Kewirausahaan Hijau – Bank Sampah"*. Terlaksananya kegiatan ini tidak terlepas dari bantuan Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara (STIPAN) sebagai lembaga yang memfasilitasi pendanaan, arahan, serta pendampingan selama proses kegiatan. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Lurah dan jajaran Kelurahan Bakti Jaya, Ketua RW 09 beserta pengurus RT, serta tokoh masyarakat yang telah menyediakan sarana, membantu koordinasi, dan memobilisasi warga sehingga kegiatan berjalan dengan lancar.

Ungkapan terima kasih yang mendalam juga kami sampaikan kepada pengelola Bank Sampah Anisa Bhakti Jaya, kelompok dasa wisma, PKK, karang taruna, serta seluruh ibu-ibu pengajian dan warga yang telah berpartisipasi aktif dalam sosialisasi dan diskusi. Antusiasme dan keterlibatan masyarakat menjadi faktor penting dalam menciptakan suasana pembelajaran yang produktif dan kolaboratif. Harapan kami, kegiatan ini dapat memberikan manfaat nyata bagi peningkatan pengetahuan, literasi regulasi, serta penguatan kapasitas masyarakat dalam mengembangkan pengelolaan sampah dan

Copyright © 2025, Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan
ISSN 2963-7856 (print), ISSN 2961-9890 (online)

wirausaha hijau secara berkelanjutan. Semoga kerja sama ini dapat terus terjalin untuk mendukung pembangunan lingkungan dan pemberdayaan komunitas di masa mendatang.

REFERENSI

Ani Marlina. (2020). Pemberdayaan, Tata Kelola Sampah Rumah Tangga melalui Indonesia, Masyarakat dan Desa di Indonesia. *Jurnal Ilmu Pendidikan (JIP) STKIP Kusuma Negara*, *11*(2), 125.

Cokorda Krisna Yudha, Ni Luh Putu Indiani*, dan B. P. (2022). Program Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber dan Pen dukungan UMKM Naik Kelas di Desa Dangin Puri Kangin, Kecamatan Denpasar Utara, Kotamadya Denpasar. *Community Services Journal (CSJ)*, *4*(2), 150–156.

Dhina Rohmawati. (2015). Kewiralembagaan dalam Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat. *JURNAL STUDI PEMUDA*, *4*(2), 296–314.

Heruman, D. A. H. (2016). BANK SAMPAH SEBAGAI ALTERNATIF STRATEGI PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS MASYARAKAT DI TASIKMALAYA. *MANUSIA DAN LINGKUNGAN*, *23*(1), 136–141.

Mawarni Hani, D. P. S. (2025). Pengembangan Kapasitas Bank Sampah Untuk Mereduksi Sampah Di Kota Tanjungpinang. *Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, *04*, 123–143.

Muhammad Rivai Hasibuan, S. P. S., & Wau, N. (2023). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH MELALUI PROGRAM BANK SAMPAH (STUDI PADA BANK SAMPAH INDUK PERMATA HATI-DLH KOTA MEDAN). *JURNAL GOVERNANCE OPINION, Vol. 8, No. 2, (2023) Oktober: 62 - 67*, *08*(2), 62–67.

Pearce, D. W., & Turner, R. K. (1990). *Economics of Natural Resources and the Environment.* (pp. 211–218).

Permen LHK RI Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah (2021).

Umami, A. (2017). PARTISIPASI MASYARAKAT LEWAT PENGEMBANGAN BANK SAMPAH SYARIAH DI KOTA METRO SEBAGAI UPAYA IMPLEMENTASI PERDA NO. 08 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA METRO. *Jurisprudence, Vol. 7 No. 2 Desember 2017*, *2*(07), 105–113.